# PENDAHULUAN UMUM

1. **SEJARAH SINGKAT**

RSUD Majenang Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1410/Menkes/XII/1997 tanggal 8 Desember 1997 dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Majenang dan diresmikan oleh Dirjen Pelayanan Medik Depkes Republik Indonesia pada tanggal 30 April 1998. Struktur RSUD Majenang Kabupaten Cilacap dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cilacap.

RSUD Majenang Kabupaten Cilacap adalah salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang telah ditetapkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah secara penuh sesuai dengan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 446/37/36/ Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Penetapan Status Penuh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap. Selain itu RSUD Majenang Kabupaten Cilacap telah mendapat izin operasional rumah sakit kelas C, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1410/Menkes/XII/1997 tanggal 8 Desember 1997.

Dasar dari Pelaksanaan RSUD Menjadi BLUD adalah, amanat dari :

* Undang – Undang, Nomor 44 Tahun 2009, Tentang Rumah Sakit
* Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
* Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomer 61 Tahun 2007, Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.

# TEMPAT KEDUDUKAN

RSUD Majenang Kabupaten Cilacap berlokasi di Jl. Dr. Soetomo No. 54 Majenang

**No. Telepon** : 0280-621012

**Email** : [humasrsudmajenang@gmail.com](mailto:humasrsudmajenang@gmail.com)

# TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dengan berdirinya RSUD Majenang merupakan Rumah Sakit rujukan bagi Puskesmas disekitar wilayah Kabupaten Cilacap bagian barat yakni Ex-Distrik Majenang (4 kecamatan), Ex Distrik Sidareja (6 kecamatan) dan Kecamatan Salem Kabupaten Brebes bagian selatan yang jaraknya hanya + 20 Km RSUD Majenang telah lulus akreditasi Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dengan sertifikat Akreditasi Rumah Sakit, No. YM.01.10/III/497/09, tanggal 18 Februari 2009, yang meliputi : Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan, Administrasi dan Manajemen dan Rekam Medis.

# VISI DAN MISI

* 1. **Visi**
     + Rumah sakit yang mengutamakan kepuasan pasien, sejahtera dan berdaya saing.

# Misi

-

-

-

-

Menciptakan kepuasan pelayanan bagi pasien

Meningkatkan kualitas pelayanan di semua instalasi sesuai dengan protap dan profesional Melaksanakan pelayanan dengan cepat, tepat, murah dan berkualitas

Meningkatkan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana sehingga mempunyai daya saing

# FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia pada RSUD Majenang Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

* 1. Pelayanan Gawat Darurat i. Pelayanan Haemodialisa
  2. Pelayanan Rawat Jalan j. Pelayanan Ambulans
  3. Pelayanan Rawat Inap k. Pelayanan Pemeliharaan Sarana
  4. Pelayanan Radiologi l. Pelayanan Gizi
  5. Pelayanan Laboratorium m. Pelayanan Laundry
  6. Pelayanan Rehabilitasi Medis n. Pelayanan Pemulasaran Jenazah
  7. Pelayanan Farmasi o. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
  8. Pelayanan Rekam Medis p. *Central Sterile Supply Department* (CSSD)

# PENGURUS RUMAH SAKIT DAN PENGELOLA BLUD

* 1. **Dewan Pengawas**
     + Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap
     + Anggota : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap

: dr. Pramesti Griana Dewi, M. Kes., M.Si.

Dewan Pengawas diatas diangkat dengan Surat Keputuan Bupati Cilacap Nomor 060/333/16/Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun (Tahun 2020-2024).

# PENGURUS RUMAH SAKIT DAN PENGELOLA BLUD

Lanjutan

# Direktur

* + - Direktur RSUD Majenang Kabupaten Cilacap adalah dr. Reza Prima Muharama, MM yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 821.2/173/16/ tahun 2021 tentang Pengangkatan Sdr. Dr. Reza Prima Muharama Sebagai Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang tanggal 23 Februari 2021.

# Pejabat Struktural

Pejabat struktural RSUD Majenang Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

i.

ii. iii. iv.

Plt. Kepala Bagian Umum Kepala Bidang Keperawatan Kepala Bidang Pelayanan

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

: Arif Abdulrahman,S.KM, MH.Kes

: Arif Abdulrahman,S.KM, MH.Kes

: dr. Nur Cahyono Anggorojati

: Andy Setiawan, S.E., M.M.

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan : Adhie Tatang Sunarya, S.Kep,Ns, MH
2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian : Slamet, SH
3. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan : Mulyadi, S.Kep, Ns
4. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap : Cahyo Nugroho, S.Kep, Ns
5. Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan

dan Rawat Inap : dr. Wartoyo

1. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan

Non Medik : Dalyanto, S.KM, MM

# Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap No. 166 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

* + - Direktur
    - Kepala Bagian Umum
      * Kepala Sub Bagian Perencanaan
      * Kepala Sub Bagian Keuangan
      * Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - Kepala Bidang Pelayanan
      * Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Rawat Inap
      * Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik
    - Kepala Bidang Keperawatan
      * Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan
      * Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap

# Pejabat Pengelola Anggaran

Pejabat Pengelola Anggaran RSUD Majenang Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

* + - Direktur UPTD BLUD RSUD Majenang Kabupaten Cilacap yaitu dr. Reza Prima Muharama, MM berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 821.2/173/16/ tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021.
    - Pejabat Keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap yaitu Andy Setiawan, S.E.,M.M. berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 900/950/16/tahun 2019 tanggal 29 April 2019.
    - Pejabat Teknis Bidang Administrasi Umum yaitu Arif Abdulrahman, S.KM, MH.Kes berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 821.2/1344/16/tahun 2019 tanggal 28 September 2019.
    - Pejabat Teknis Bidang Keperawatan yaitu Arif Abdulrahman, S.KM, MH.Kes berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 821.2/1344/16/tahun 2019 tanggal 28 September 2019.
    - Pejabat Teknis Bidang Pelayanan yaitu dr. Nurcahyono Anggorojati berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 821.2/1344/16/tahun 2019 tanggal 28 September 2019.

# SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jumlah Sumber Daya Manusia RSUD Majenang Kabupaten Cilacap per 31 Desember 2021 sebanyak 433 orang yang terdiri atas :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31/12/2021** | **31/12/2020** |
| **-** Pegawai PNS | 206 | 206 |
| **-** Pegawai non PNS/kontrak | 229 | 186 |
| **Jumlah Karyawan** | **435** | **392** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MAJENANG** | | |
| **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN** | | |
| **UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021** | | |
| (Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | | |
| **8** | **LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN** | |
| Laporan Keuangan RSUD Majenang Kabupaten Cilacap disusun dengan berlandaskan pada: | | |
| **-** |  | Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| **-** |  | Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |
| **-** |  | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4286); |
| **-** |  | Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); |
| **-** |  | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4844); |
| **-** |  | Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; |
| **-** |  | Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tetang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
| **-** |  | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
| **-** |  | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); |
| **-** |  | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; |
| **-** |  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; |
| **-** |  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; |
| **-** |  | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan  Umum; |
| **-** |  | Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU)  Rumah Sakit; |
| **-** |  | Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 161 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah BLUD Rumah  Sakit Daerah Majenang Kabupaten Cilacap. |
| **-** |  | Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata  Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. |
| **-** |  | Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten  Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159). |
| **-** |  | Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 198 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah BLUD  Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap. |
| **-** |  | Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah BLUD  Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap. |
| **-** |  | Peraturan Bupati Cilacap Nomor 206 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan pada RSUD Majenang Kabupaten Cilacap. |
| **-** |  | Peraturan Bupati Cilacap Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap. |
| **-** |  | Peraturan Bupati Cilacap Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap. |
| **KEBIJAKAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI** | | |
| **9 I** | **KHTISAR KEBIJAKAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI** | |
|  | **a.** | **Pola Pengelolaan Keuangan BLUD** |
|  |  | Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. |
|  |  | Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteran umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. |
|  | **b.** | **Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan** |
|  |  | Laporan keuangan disusun secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance* ) dengan menyajikan informasi pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MAJENANG** | | | |
| **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN** | | | |
| **UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021** | | | |
| (Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | | | |
| **9** | **IKHTISAR KEBIJAKAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI** | | |
|  | Lanjutan | | |
|  | **b.** | **Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan** | |
|  |  | Lanjutan | |
|  |  | Laporan Keuangan RSUD Majenang Kabupaten Cilacap tahun 2021 disusun guna menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, operasional keuangan, arus kas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi. | |
|  |  | Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan, penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai serta menyediakan informasi yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar dalam lembar muka *(on the face)* laporan keuangan. | |
|  |  | Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : | |
|  |  | i. | Akuntabilitas |
|  |  |  | Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. |
|  |  | ii. | Manajemen |
|  |  |  | Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana. |
|  |  | iii. | Transparansi |
|  |  |  | Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban RSUD Majenang Kabupaten Cilacap dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan. |
|  |  | Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pelaporan keuangan RSUD Majenang Kabupaten Cilacap menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan: | |
|  |  | i. | Menyedikan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah |
|  |  | ii | Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah, |
|  |  | iii. | Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi |
|  |  | iv. | Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan |
|  |  | v. | Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya |
|  |  | vi. | Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dan |
|  |  | vii. | Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. |
|  |  | Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, , pendapatan LO, dan beban. Laporan Keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2021. Laporan keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). | |
|  | **c.** | **Entitas Akuntansi** | |
|  |  | Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap secara keseluruhan, sedangkan pusat- pusat pertanggungjawaban adalah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai Entitas akuntansi. | |
|  |  | BLUD RSUD MAJENANG selaku entitas akuntansi memiliki kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan secara periodik untuk dikompilasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. | |
|  | **d.** | **Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan** | |
|  |  | Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan- LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar dalam bentuk barang atau jasa disajikan pula pada Laporan Operasional. | |
|  |  | Basis akrual adalah pengakuan transaksi pada saat terjadinya, tidak terbatas pada transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. | |
|  |  | Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan. | |

# 9 IKHTISAR KEBIJAKAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI

Lanjutan

# Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pendapatan diakui pada saat jasa sudah diberikan. Beban diakui pada saat terjadinya, tidak terbatas pada saat transaksi pengeluaran kas untuk keperluan operasional, khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan histroris. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan umtuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah:

* 1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
  2. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, yaitu merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar kas (*cash basis* ) dengan metode penilaian atas dasar akrual (*accrual basis* );
  3. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember;
  4. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset RSUD Majenang Kabupaten Cilacap; dan
  5. Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan *(perpectual)* .

# Dasar Akuntansi

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterbitkan oleh KSAP dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan keuangan (CLK). Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disajikan dengan metode langsung. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

# Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD. Kas terdiri dari saldo kas ditangan dan rekening giro.

Setara kas (*cash on equivalent* ) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominalnya.

# Piutang

Piutang adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional RSUD. Piutang usaha memiliki karakteristik sebagai berikut : terdapat penyerahan barang, jasa atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode normal akuntasi.

Piutang jasa layanan atas jasa layanan kepada pasien umum diakui dan dicatat pada saat kasir membuat daftar rincian tagihan beban perawatan dan/atau diberikannya persetujuan oleh pejabat yang ditunjuk atas beban perawatan yang belum dibayar, yang dituangkan pada form Surat Pernyataan yang ditandatangani pihak keluarga yang bertanggung jawab terhadap pasien dan pembayaran. Piutang jasa layanan atas jasa layanan kepada pasien dengan sistem pembayaran klaim yang berasal dari perusahaan swasta yang bekerja sama dengan RSUD Majenang Kabupaten Cilacap diakui dan dicatat pada saat pengajuan klaim kepada masing-masing pihak tersebut.

Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value* ) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih atas piutang usaha dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan cluster atau kelompok dan umur piutang. Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun (Berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 100 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap) ditentukan sebagai berikut:

Penaksiran jumlah penyisihan tersebut dilakukan berdasarkan hasil analisa umur piutang sebagai berikut:

1. Piutang Lancar (umur kurang dari 1 tahun) : 0,5% dari nilai piutang
2. Piutang Kurang Lancar (umur 1 s/d 2 tahun) : 10% dari nilai piutang
3. Piutang Diragukan (umur 3 s/d 5 tahun) : 50% dari nilai piutang
4. Piutang Macet (umur lebih dari 5 tahun) : 100% dari nilai piutang

# Persediaan

Pembelian persediaan dalam bentuk bahan atau perlengkapan habis dipakai atau untuk dijual dicatat sebagai beban sebesar nilai perolehannya. Pengertian nilai perolehan adalah seluruh beban pembelian dan beban-beban lain yang dikeluarkan sampai persediaan tersebut diterima di RSUD Majenang Kabupaten Cilacap.

Persediaan yang belum digunakan/belum terpakai/belum terjual pada akhir periode akuntansi diakui berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname* ). Sisa persediaan tersebut dicatat dalam neraca dan mengoreksi/mengurangi nilai beban barang dan jasa.

# 9 IKHTISAR KEBIJAKAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI

Lanjutan

# Persediaan

Lanjutan

Persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai realisasi bersih (harga jual dikurangi beban untuk menyelesaikan dan menjual), mana yang lebih rendah, harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

Persediaan dicatat pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah dan berkurang pada saat dipakai, dijual, kadaluarsa dan rusak. Persediaan diukur berdasarkan beban perolehan.

Beban perolehan persediaan meliputi semua beban pembelian dan beban lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan atau dijual.

# Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

* + Berwujud
  + Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.
  + Beban perolehan aset dapat diukur secara andal.
  + Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
  + Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dimanfaatkan.

Aset tetap yang diperoleh dari pembelian, pekerjaan konstruksi dan/atau donasi diakui dalam periode berjalan, pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan aset tetap sampai saat ini mengikuti kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap. Aset tetap dinilai dengan beban perolehan termasuk beban-beban yang dapat diatribusikan secara langsung sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan beban perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Tanah diukur berdasarkan seluruh beban yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah tersebut sampai dengan siap digunakan. Beban ini meliputi harga pembelian, beban pembebasan tanah, beban untuk memperoleh hak, beban yang berhubungan dengan pengukuran, beban pengurugan, dan lain-lain. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

Peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya diukur sebesar beban perolehan. Namun demikian untuk menetapkan beban perolehan peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya, harus mengacu kepada kebijakan tentang batasan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya, yang tidak produktif karena rusak dan/atau tidak berfungsi, serta aset tetap yang sudah tidak dapat ditelusuri fisiknya harus disajikan secara terpisah kedalam kelompok Aset Lainnya subkelompok Aset Tetap Non-Produktif sebesar nilai bukunya (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan). Usulan penghapusan aset tetap non-produktif ini diajukan oleh Direktur RSUD kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan yang selanjutnya mengikuti prosedur yang berlaku. Setelah ada penetapan Bupati, kerugian penghapusan dibebankan sebagai Beban Non-Operasional Lainnya sebesar nilai buku tersebut.

Gedung diukur berdasarkan seluruh beban yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Beban ini meliputi harga beli, beban pengurusan IMB, notaris, pajak, dan lain-lain. Beban konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan beban tak langsung lainnya. Aset tetap yang dibangun sendiri dicatat sebesar seluruh nilai bahan/peralatan yang digunakan, beban pengerjaan serta beban-beban umum lainnya yang terkait dengan pembangunan aset tetap tersebut termasuk beban bunga selama masa konstruksi.

Konstruksi dalam Pengerjaan diukur berdasarkan jumlah yang telah dikeluarkan termasuk beban-beban lainnya yang dapat diatribusikan kepada aset tersebut.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap tersebut apabila:

1. Memperpanjang masa manfaat
2. Meningkatkan kapasitas
3. Meningkatkan mutu produksi/standar kinerja.

Sedangkan pengeluaran untuk suatu aset tetap dengan maksud untuk mempertahankan fungsinya pada kapasitas dan masa manfaat yang seharusnya, diakui sebagai beban / beban saat terjadinya.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Aset donasi diakui pada saat penyerahan atau perpindahan kepemilikan aset yang didukung dengan berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan. Perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, baik pengeluaran untuk pengadaan baru maupun penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan rehabilitasi mengacu pada Peraturan Bupati Cilacap Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap dan/atau perubahannya jika ada dengan rincian :

1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MAJENANG** | | | | | | |
| **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN** | | | | | | |
| **UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021** | | | | | | |
| (Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | | | | | | |
| **9** | **IKHTISAR KEBIJAKAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI** | | | | |  |
|  | Lanjutan | | |  |  |  |
|  | **j.** | **Aset Tetap** | | |  |  |
|  |  | Lanjutan | | |  |  |
|  |  | iii. | Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban pada periode pelaporan, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi buku perpustakaan. Tidak ada batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan baru atau pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap jalan, irigasi dan jaringan. Semua pengeluaran dalam rangka pengadaan baru atau pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dikapitalisasi dan menambah nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan, sepanjang pengeluaran tersebut mengakibatkan peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas atau masa manfaat. | | | |
|  |  | Penyesuaian aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential)* yang akan mengalir ke pemerintah. | | | | |
|  |  | Aset tetap, kecuali tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan aset lain-lain (aset yang akan dihapuskan), disusutkan. | | | | |
|  |  | i. | Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada pada Peraturan Bupati Cilacap Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap. | | | |
|  |  | ii. | Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: | | |  |
|  |  |  | - | Tanah; |  |  |
|  |  |  | - | Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); | |  |
|  |  |  | - | Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan, hewan dan tumbuhan. | | |
|  |  | iii. | Perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. | | | |
|  |  | iv. | Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat. | | | |
|  |  | v. | Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada pada Peraturan Bupati Cilacap Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Daerah. | | | |
|  |  | Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut: | | | |  |
|  |  |  | **Jenis Aset Tetap** | | **Masa Manfaat** | **Tarif Penyusutan** |
|  |  |  | Peralatan dan mesin | | 2-20 tahun | 5-25% |
|  |  |  | Gedung dan bangunan | | 40-50 tahun | 2-2,5% |
|  |  |  | Jaringan dan instalasi | | 10-50 tahun | 2-10% |
|  |  | Keterangan: | | |  |  |
|  |  | i. | Peralatan dan mesin termasuk alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat kantor dan rumah tangga, alat studio & komunikasi,alat pertanian/perlengkapan, alat kedokteran, alat keamanan dan alat laboratorium. | | | |
|  |  | ii. | Gedung dan bangunan termasuk bangunan gedung dan monumen. | | |  |
|  |  | iii. | Jaringan dan instalasi termasuk jalan dan jembatan, instalasi dan jaringan. | | | |
|  | **k.** | **Aset Lainnya** | | |  |  |
|  |  | Aset lainnya adalah aset rumah sakit selain aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Aset yang termasuk dalam aset tetap lainnya adalah aset tak berwujud dan aset lancar lainnya. Aset lainnya di rumah sakit terdiri atas : | | | | |
|  |  | i. | Aset Tak Berwujud | |  |  |
|  |  |  | Aset tidak berwujud diakui apabila RSUD akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan beban perolehan tersebut dapat diukur secara andal. Diakui saat terjadinya transaksi atau adanya penetapan hak. | | | |
|  |  |  | Aset tak berwujud dicatat sebesar beban perolehan meliputi semua beban yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tersebut. Aset tak berwujud yang dilepas atau tidak ada lagi manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaannya dan pelepasan yang dilakukan sesudahnya, tidak diakui lagi dan dihapuskan dari neraca. | | | |
|  |  |  | Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman pada berpedoman pada Peraturan Bupati Cilacap Nomor 100 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Kabupaten Cilacap. | | | |
|  |  |  | Jenis Aset Tak Berwujud | | Masa Manfaat | Tarif Amortisasi |
|  |  |  | Software komputer | | 5 tahun | 10% |
|  |  | ii. | Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga | | |  |
|  |  |  | Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui pada saat penyerahan aset tetap berwujud RSUD (tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan) kepada pihak lain dalam rangka kemitraan. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MAJENANG** | | | | |
| **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN** | | | | |
| **UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021** | | | | |
| (Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | | | | |
| **9** | **IKHTISAR KEBIJAKAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI** | | | |
|  | Lanjutan | | |  |
|  | **k.** | **Aset Lainnya** | | |
|  |  | Lanjutan | | |
|  |  | ii. | Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga (Lanjutan) | |
|  |  |  | Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan hal berikut: | |
|  |  |  | a. | Pola Bangun, Kelola, Serah (BKS)*/Build, Operate, Transfer* (BOT) |
|  |  |  |  | Dicatat sebagai Aset Kemitraan/Aset KSO sebesar beban perolehan, apabila RSUD (sebagai pemilik aset) menyerahkan aset tetap untuk diusahakan dalam kemitraan. Dengan penyerahan ini rekening aset tetap dikredit sebesar beban perolehan. |
|  |  |  |  | Dicatat sebagai Penyertaan KSO/Investasi Non-Permanen sebesar dana yang ditanamkan oleh RSUD apabila RSUD ikut menanamkan dana untuk membangun aset kemitraan tersebut. |
|  |  |  |  | Dicatat sebagai Aset Kemitraan/Aset KSO sebesar beban perolehan (RSUD sebagai investor) bila investor yakin akan adanya manfaat ekonomi dari aset tersebut dan beban perolehan aset tersebut bisa diukur dengan andal. |
|  |  |  |  | Dalam hal RSUD sebagai investor adalah juga pengelola KSO, maka penyusutan yang diperkenankan untuk aset KSO maksimal sampai berakhirnya masa konsesi. |
|  |  |  | b. | Pola Bangun, Serah, Kelola (BSK)/*Build, Transfer, Operate* (BTO) |
|  |  |  |  | Dicatat sebagai Aset Kemitraan/Aset KSO sebesar beban perolehan, apabila RSUD (sebagai pemilik aset) menyerahkan aset tetap untuk diusahakan dalam kemitraan. Dengan penyerahan ini rekening aset tetap dikredit sebesar beban perolehan. |
|  |  |  |  | Dicatat sebagai Aset Kemitraan/Aset KSO sebesar beban pembangunannya atau dalam hal beban pembangunan tidak diketahui bisa menggunakan beban pembangunan yang disepakati dalam perjanjian KSO, atau sebesar nilai wajar pada saat aset KSO diserahkan. Pencatatan aset kemitraan ini dengan cara mengkredit rekening pendapatan “Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain/Hasil Kerjasama Operasional” dalam hal ada kepastian tentang manfaat ekonomi dari diperolehnya aset tersebut. Apabila tidak memiliki kepastian yang cukup tentang manfaat ekonomi dari aset tersebut maka dengan cara mengkredit rekening “Pendapatan yang Ditangguhkan”. |
|  |  |  |  | Aset Kemitraan/Aset KSO (bangunan) disusutkan selama umur ekonomi aset yang bersangkutan, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi. |
|  |  | iii. | Aset Lainnya | |
|  |  |  | Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap tersebut tidak dipergunakan lagi dalam kegiatan normal RSUD. | |
|  |  |  | Aset Tetap Lainnya dinilai sebesar nilai bukunya (yaitu hasil pengurangan nilai perolehan dengan akumulasi penyusutannya) atau estimasi nilai wajar apabila tidak terdapat nilai bukunya. | |
|  | **l.** | **Kewajiban Jangka Pendek** | | |
|  |  | Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Pengukuran kewajiban jangka pendek dinilai sebesar nilai nominal. | | |
|  |  | Jenis kewajiban jangka pendek antara lain: | | |
|  |  | i. | Utang Usaha | |
|  |  |  | Utang usaha diakui pada saat RSUD menerima jasa/hak atas barang/jasa, tetapi RSUD belum membayar atas barang/jasa yang diterima. Apabila RSUD menerima pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan maka utang usaha diakui saat dana pinjaman diterima. Kewajiban  jangka pendek dinilai sebesar nilai nominal yang harus dibayar. | |
|  |  | ii. | Pendapatan diterima dimuka | |
|  |  |  | Pendapatan diterima di muka diakui pada saat diterimanya kas dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi RSUD belum  memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga | |
|  |  | iii. | Beban yang Masih Harus Dibayar | |
|  |  |  | Beban yang masih harus dibayar diakui pada saat RSUD telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi RSUD belum melakukan  pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima | |
|  |  | iv. | Utang Pajak | |
|  |  |  | Utang pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan RSUD untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan  perundang-undangan yang berlaku | |
|  |  | v. | Kewajiban Jangka Pendek Lainnya | |
|  |  |  | Kewajiban jangka pendek lainnya diakui pada saat timbulnya kewajiban tersebut | |
|  | **m.** | **Kewajiban Jangka Panjang** | | |
|  |  | Kewajiban jangka panjang berupa pendapatan yang ditangguhkan diakui pada saat RSUD menerima hak dari pihak lain tetapi RSUD belum memenuhi kewajiban kepada pihak tersebut. Kewajiban jangka panjang diakui saat dana pinjaman diterima dan/atau saat kewajiban timbul. | | |
|  | **n.** | **Ekuitas** | |  |
|  |  | Ekuitas adalah hak residual atas aset setelah diperhitungkan kewajiban. | | |
|  |  | Ekuitas adalah kekayaan bersih RSUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban RSUD pada tanggal laporan. | | |
|  |  | Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). | | |
|  |  | Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih  evaluasi aset tetap, setoran ke kas daerah, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). | | |

-

-

-

-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MAJENANG** | | | | | | | |
| **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN** | | | | | | | |
| **UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021** | | | | | | | |
| (Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | | | | | | | |
| **9** | **IKHTISAR KEBIJAKAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI** | | | | |  |  |
|  | Lanjutan | | |  |  |  |  |
|  | **n.** | **Ekuitas** | |  |  |  |  |
|  |  | Lanjutan | |  |  |  |  |
|  |  | Ekuitas Tidak Terikat diakui pada saat | | |  |  |  |
|  |  | i. | Ditetapkannya nilai kekayaan BLUD. | |  |  |  |
|  |  | ii. | Diterimanya sumbangan/bantuan yang tidak mengikat yang tidak berupa kas (noncash). | | | |  |
|  |  | iii. | Diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan yang tidak mengikat. | | |  |  |
|  |  | iv. | Pengalihan ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat. | | |  |  |
|  |  | Ekuitas Terikat Temporer | |  |  |  |  |
|  |  | i. | Ditetapkannya nilai kekayaan BLUD. | |  |  |  |
|  |  | ii. | Diterimanya sumbangan/bantuan yang tidak mengikat yang tidak berupa kas (noncash). | | | |  |
|  |  | iii. | Diterimanya aset sumbangan/bantuan yang mengikat secara temporer | | |  |  |
|  |  | Ekuitas Terikat Permanen | |  |  |  |  |
|  |  | i. | Ditetapkannya nilai kekayaan RSUD pada saat ditetapkan untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan BLUD. | | | | |
|  |  | ii. | Diterimanya sumbangan/bantuan yang tidak mengikat yang tidak berupa kas (*noncash* ). | | | |  |
|  |  | iii. | Diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan. | | |  |  |
|  | **o.** | **Pendapatan LO** | |  |  |  |  |
|  |  | Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas rumah sakit selama satu periode yang mengakibatkan perubahan ekuitas bersih. | | | | | |
|  |  | Pendapatan RSUD diklasifikasi dalam: | | |  |  |  |
|  |  | i. | Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan | |  |  |  |
|  |  |  | Untuk pendapatan jasa layanan yang berasal dari pasien umum, pendapatan diakui pada saat kas diterima atau timbulnya hak tagih atau saat selesainya pelayanan jasa. Untuk pendapatan jasa layanan yang berasal dari pasien dengan sistem pembayaran klaim seperti BPJS, pasien In Health, pasien Jamkesda, pasien perusahaan yang melakukan kerjasama dengan RSUD, pendapatan diakui pada saat klaim diajukan pihak- pihak tersebut. | | | | |
|  |  | ii. | Pendapatan Hibah |  |  |  |  |
|  |  |  | Pendapatan Hibah (berupa uang/barang) diakui pada saat diterima oleh RSUD. | | |  |  |
|  |  | iii. | Pendapatan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | | |  |  |
|  |  |  | Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lain diakui pada saat kas diterima dan/atau timbulnya hak tagih | | | | |
|  |  | iv. | Pendapatan APBN/APBD |  |  |  |  |
|  |  |  | Pendapatan dari APBN/APBD diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D-LS/GU dan/atau  GU/TU Nihil. | | | | |
|  |  | v. | Lain-lain Pendapatan RSUD yang sah | |  |  |  |
|  |  |  | Lain-lain Pendapatan RSUD yang sah antara lain hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah diakui pada saat kas diterima. | | | | |
|  |  | Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran). | | | | | |
|  |  | Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan yang telah diterima/diakui) yang terjadi pada periode berjalan  dicatat sebagai pengurangan pendapatan. | | | | | |
|  |  | Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan/atau akan diterima. | | | | | |
|  |  | Pada akhir tahun, pendapatan diakui sepanjang manfaat ekonomi dapat diukur dengan andal walaupun belum ada arus kas masuk. | | | | | |
|  | **p.** | **Beban** | |  |  |  |  |
|  |  | Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas. | | | | | |
|  |  | Beban yang timbul dari pengeluaran yang bersumber dari APBD diakui dan dicatat pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D-LS/GU dan/atau GU/TU Nihil. | | | | | |
|  |  | Beban yang timbul dari pengeluaran yang bersumber dari pendapatan fungsional (Kas BLUD) diakui dan dicatat pada saat pengeluaran kas oleh bendahara pengeluaran atas pengeluaran definitif. | | | | | |
|  |  | Beban RSUD diklasifikasikan sebagai berikut : | | |  |  |  |
|  |  | i. | Beban pegawai; | v. | Beban langganan daya dan jasa; | ix. | Beban bunga utang pinjaman |
|  |  | ii. | Beban persediaan; | vi. | Beban perjalanan dinas; | x. | Beban non operasional. |
|  |  | iii. | Beban barang dan jasa | vii. | Beban penyusutan dan amortisasi; |  |  |
|  |  | iv. | Beban pemeliharaan; | viii | Beban Penyisihan Piutang |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MAJENANG** | | | | | | |
| **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN** | | | | | | |
| **UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021** | | | | | | |
| (Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | | | | | | |
| **9** | **KHTISAR KEBIJAKAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI** | | | |  |  |
| Lanjutan | | | | | | |
| **p.** | | **Beban** | |  |  |  |
| Lanjutan | | | | | | |
| Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal. Beban dan kerugian dicatat sebesar : | | | | | | |
|  |  | i. | Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan. | | |  |
|  |  | ii. | Jumlah beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang. | |  |  |
|  |  | iii. | Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan. | |  |  |
|  |  | iv. | Jumlah kerugian yang terjadi. |  |  |  |
| Beban dicatat berdasarkan kas yang dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan. | | | | | | |
| **q.** | | **Hibah** | |  |  |  |
| Hibah adalah pemberian (secara sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang atau lembaga lain, pihak pemberi tidak mengharapkan imbal jasa atas transaksi tersebut. Biasanya transaksi hibah diperkuat dengan suatu akta notaris, diketahui pemerintah daerah, saksi- saksi dan sebagainya. Dalam kegiatannya, RSUD dapat menerima lebih dari masyarakat/badan lain dapat berupa barang ataupun jasa. Untuk alasan kepraktisan, penerimaan hibah jasa tidak dicatat. Dari sisi peruntukannya, hibah dapat dikelompokkan ke dalam hibah tidak terikat dan hibah  terikat. | | | | | | |
| Hibah yang diperoleh dari masyarakat/badan lain yang peruntukannya tergantung pada pembatasan gangguan oleh pemberi hibah, dicatat pada ekuitas terikat. Hibah terikat dibedakan antara lain yaitu : | | | | | | |
|  |  | i. | Pembebanan operasional tertentu, yaitu: membebani kegiatan operasional/ pembebasan kewajiban (*Specific Purpose Fund* ). | | | |
|  |  | ii. | Investasi keuangan (*Endowment Fund)* |  |  |  |
|  |  | iii. | Pemerolehan aset tetap (*Plant Replacement dan Expansion Fund).* | |  |  |
| **10** | **DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN** | | |  |  |  |
| DPA-RSUD mencakup antara lain: | | | | | | |
|  |  | Proyeksi pendapatan dan beban; | |  |  |  |
|  |  | Proyeksi arus kas (penerimaan dan pengeluaran); dan | | |  |  |
|  |  | Proyeksi jumlah dan kualitas jasa kesehatan yang akan dihasilkan. | | |  |  |
| BPKAD mengesahkan DPA-RSUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Pengesahan DPA-RSUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal DPA-RSUD belum disahkan oleh BPKAD, RSUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-RSUD tahun sebelumnya. DPA-RSUD yang telah disahkan oleh BPKAD menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD. | | | | | | |
| Penarikan dana digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebesar selisih *(mismatch)* jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-RSUD. | | | | | | |
| DPA-RSUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Direktur RSUD. | | | | | | |
| Perjanjian kinerja merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Direktur RSUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja *(contractual performance agreement)* . Dalam perjanjian kinerja Bupati menugaskan Direktur RSUD untuk menyeienggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-RSUD. | | | | | | |
| Perjanjian kinerja memuat kesanggupan untuk meningkatkan: | | | | | | |
|  |  | Kinerja pelayanan bagi masyarakat; | |  |  |  |
|  |  | Kinerja keuangan; dan | |  |  |  |
|  |  | Manfaat bagi masyarakat. | |  |  |  |
| **11** | **PENYAJIAN KEMBALI** | | |  |  |  |
|  | Manajemen memutuskan untuk melakukan penyajian kembali laporan keuangan per 31 Desember 2020, sebagai dampak pengaruh koreksi BPK pada tahun buku 2020 sebagai berikut: | | | | | |
|  |  |  | 31 Desember 2020 | Dilaporkan  sebelumnya | Setelah Penyajian  Kembali | Perubahan |
|  | Piutang Layanan | | | 3.571.162.637 | 10.379.503.437 | 6.808.340.800 |
|  | Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah | | | (267.605.840) | (695.045.158) | (427.439.318) |
|  | Akm. Peny. Peralatan dan mesin | | | (29.227.831.082) | (29.498.550.245) | (270.719.163) |
|  | Akm. Peny. Gedung dan bangunan | | | (2.561.359.237) | (2.489.827.807) | 71.531.430 |
|  | Akm. Peny. Jalan, irigasi dan jaringan | | | (658.620.765) | (470.112.457) | 188.508.308 |
|  | Aset Tak Berwujud | | | 236.081.476 | 131.562.500 | (104.518.976) |
|  | Akm. Amortisasi Software | | | (201.072.361) | (96.553.385) | 104.518.976 |
|  | Utang Barang dan Jasa | | | - | (258.605.709) | (258.605.709) |
|  | Ekuitas Lainnya | | | (953.577.617) | (7.229.960.123) | (6.276.382.506) |
|  | Surplus (Defisit) Tahun Lalu | | | (11.810.405.501) | (11.645.639.343) | 164.766.158 |
|  | Jumlah | |  | (41.873.228.290) | (41.873.228.290) | - |

# I

**-**

# -

**-**

# -

**-**

# -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **12 PENDAPATAN - LRA** |  | |
| Pendapatan - LRA merupakan pendapatan BLUD yang diterima tahun 2021 dan tahun 2020 terdiri dari: |
| **No. Uraian Tahun 2021 (Lebih/**  **Anggaran Realisasi kurang)** | **%** | **Realisasi**  **2020** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A PENDAPATAN BLUD** | **66.550.000.000** | **99.480.024.159** | **32.930.024.159** | **149,48** | **63.344.461.816** |
| * Pendapatan jasa layanan masyarakat * Pendapatan hasil kerjasama | 66.050.000.000  300.000.000 | 99.109.236.405  230.903.500 | 33.059.236.405  (69.096.500) | 150,05  76,97 | 62.076.358.362  54.783.200 |
| **-** Pendapatan Hibah | - | - | - | - | 522.473.404 |
| **-** Pendapatan usaha lainnya | 200.000.000 | 139.884.254 | (60.115.746) | 69,94 | 690.846.850 |
| Rincian pendapatan - LRA dapat dilihat pada **Lampiran I** | | |  |  |  |
| **13 BELANJA** | | |  |  |  |
| Belanja tahun 2021 dan 2020 terdiri dari: | | |  |  |  |
| **No. Uraian Tahun 2021** | | | **(Lebih/** | **%** | **Realisasi** |
|  | **Anggaran** | **Realisasi** | **kurang)** |  | **2020** |
|  |  |  |  |  |  |
| **A BELANJA OPERASIONAL** | **71.673.784.085** | **76.956.561.136** | **5.282.777.051** | **107,37** | **71.343.750.520** |
| Belanja Pegawai | 20.647.892.157 | 19.284.167.211 | (1.363.724.946) | 93,40 | 12.283.573.673 |
| Belanja barang dan jasa | 51.025.891.928 | 57.672.393.925 | 6.646.501.997 | 113,03 | 58.537.703.443 |
| Belanja hibah | - | - | - | - | 522.473.404 |
| **B BELANJA MODAL** | **31.139.053.430** | **26.068.067.074** | **(5.070.986.356)** | **83,72** | **5.116.154.590** |
| Belanja peralatan dan mesin | 19.043.050.590 | 14.382.665.277 | (4.660.385.313) | 75,53 | 5.116.154.590 |
| Belanja gedung dan bangunan | 12.096.002.840 | 11.685.401.797 | (410.601.043) | 96,61 | - |
| Belanja jalan, irigasi dan jaringan | - | - | - | - | - |
| Belanja aset tetap lainnya | - | - | - | - | - |
| Belanja aset lainnya | - | - | - | - | - |

Rincian belanja dapat dilihat pada **Lampiran I**

# 14 PENDAPATAN ALOKASI APBD

Merupakan penerimaan bersih dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut:

# No. Uraian Tahun 2021 (Lebih/ % Realisasi

**Anggaran Realisasi kurang) 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A PENDAPATAN APBD** | **30.519.539.799** | **30.496.110.939** | **(23.428.860)** | **99,92** | **15.226.341.761** |
| Belanja Pegawai | 12.972.487.976 | 12.949.059.116 | (23.428.860) | 99,82 | 12.283.573.673 |
| Belanja barang dan jasa | 1.912.857.136 | 1.912.857.136 | - | 100,00 | - |
| Belanja Modal | 15.634.194.687 | 15.634.194.687 | - | 100,00 | 2.942.768.088 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **15 SALDO AWAL** |  | |
| Merupakan saldo anggaran lebih awal per 1 Januari 2021 dan 2020 terdiri dari: |
|  | **01 Januari 2021** | **01 Januari 2020** |
| **-** Kas BLUD | 23.979.400 | 4.000.000 |
| **-** PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah | 2.545.810.828 | 237.060.161 |
| **-** PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. | - | - |
| **-** Setara Kas | 4.000.000 | - |
| **Jumlah Saldo Awal** | **2.573.790.228** | **241.060.161** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **16 SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS** |  | |
| Merupakan saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari : |
|  | **31 Desember 2021** | **31 Desember 2020** |
| **-** Kas BLUD | - | 23.979.400 |
| **-** PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah | 22.299.413.461 | 2.545.810.828 |
| **-** PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 52.055 | - |
| **-** Setara Kas | - | 4.000.000 |
| **Jumlah Kas dan Setara Kas** | **22.299.465.516** | **2.573.790.228** |

Saldo kas dan bank telah sesuai dengan Berita Acara Opname Kas dan Rekening Koran Bank tanggal 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran II**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17 DEPOSITO BERJANGKA** |  | |
| Merupakan saldo deposito RSUD Majenang per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari : |
|  | **31 Desember 2021** | **31 Desember 2020** |
| **-** PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 7.000.000.000 | - |
| **Jumlah Kas dan Setara Kas** | **7.000.000.000** | **-** |

# 18 PIUTANG USAHA

Merupakan tagihan kepada perseorangan, pemerintah maupun lembaga yang melakukan kerjasama dengan RSUD atau pendapatan yang sudah menjadi hak RSUD Majenang Kabupaten Cilacap tetapi sampai dengan 31 Desember 2021 masih belum diterima secara tunai, dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021** | **31 Desember 2020 \*)** |
| **-** Piutang Layanan | 5.143.630.378 | 10.379.503.437 |
| **Jumlah** | **5.143.630.378** | **10.379.503.437** |
| **-** Penyisihan Piutang | (268.033.072) | (695.045.158) |
| **Jumlah Piutang Neto** | **4.875.597.306** | **9.684.458.279** |
| Rincian Piutang Usaha dari kegiatan operasional adalah sebagai berikut : |  |  |
|  | **31 Desember 2021** | **31 Desember 2020 \*)** |
| **-** Piutang Jasa Layanan Pasien Umum | 263.572.175 | 274.508.877 |
| **-** Piutang Jasa Layanan Pasien BPJS Kesehatan | 3.886.487.789 | 5.960.423.400 |
| **-** Piutang Jasa Layanan Karyawan / Pegawai | 5.609.600 | 7.208.100 |
| **-** Piutang Iuran Bayar BPJS Kesehatan | 21.464.660 | 10.498.660 |
| **-** Piutang Pelayanan Karyawan | 2.672.400 | - |
| **-** Piutang BPJS Ketenagakerjaan | - | 4.241.300 |
| **-** Piutang Jasa Raharja | 5.850.154 | 14.281.400 |
| **-** Piutang Tes Cepat Molekuler | 25.050.000 | 9.050.000 |
| **-** Piutang COVID-19 | 932.923.600 | 4.099.291.700 |
| Jumlah | 5.143.630.378 | 10.379.503.437 |

Sesuai dengan peraturan Bupati Cilacap Nomor 100 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tetang kebijakan akuntansi di lingkungan pemerintah kabupaten Cilacap tentang penyisihan piutang tidak tertagih untuk obyek bukan pajak selain retribusi dihitung sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategori Penyisihan Piutang | Nilai | **%** | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 \*) |
| Lancar | 4.849.285.687 | 0,5% | 24.246.428 | 31.894.890 |
| Kurang Lancar | 27.276.800 | 10% | 2.727.680 | 1.340.020 |
| Diragukan | 52.017.856 | 50% | 26.008.928 | 30.537.847 |
| Macet | 215.050.035 | 100% | 215.050.035 | 631.272.401 |
| Jumlah | 5.143.630.378 |  | 268.033.072 | 695.045.158 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **19 PERSEDIAAN** |  | |
| Merupakan nilai persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari : |
| Persediaan Layanan: | **31 Desember 2021** | **31 Desember 2020** |
| - Obat-obatan dan BHP medis | 3.852.492.976 | 3.252.680.311 |
| Sub Jumlah | 3.852.492.976 | 3.252.680.311 |

Daftar Persediaan Layanan dapat dilihat pada: **Lampiran III**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **19 PERSEDIAAN**  Lanjutan | |  | |
| Persediaan Non Layanan: | | **31 Desember 2021** | **31 Desember 2020** |
| **-** Alat Tulis Kantor | | 19.083.380 | 19.258.789 |
| **-** Bahan Pembersih | | 25.086.080 | 12.254.159 |
| **-** Bahan Makanan | | 719.850 | 2.105.250 |
| **-** Alat Listrik dan Elektronik | | 3.659.500 | 1.423.500 |
| **-** Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | | 440.000 | 45.000 |
| **-** Tabung Gas | | 2.700.000 | 7.200.000 |
| Sub Jumlah | | 51.688.810 | 42.286.698 |
| **-** | **Jumlah Sebelum Penyisihan**  Penyisihan Persediaan | **3.904.181.786**  - | **3.294.967.009**  - |
|  | **Jumlah Persediaan Neto** | **3.904.181.786** | **3.294.967.009** |

Daftar Persediaan Non Layanan dapat dilihat pada: **Lampiran IV**

# 20 ASET TETAP

Merupakan nilai perolehan aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020, terdiri dari :

# TAHUN 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020 \*)** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **31 Desember 2021** |
| **Biaya Perolehan**  **-** Tanah | 3.801.318.523 | - | - | 3.801.318.523 |
| **-** Peralatan dan mesin | 41.860.437.159 | 13.777.284.608 | - | 55.637.721.767 |
| **-** Gedung dan bangunan | 23.682.760.045 | 7.572.495.918 | - | 31.255.255.963 |
| **-** Jaringan dan instalasi | 2.680.865.043 | 695.788.569 | - | 3.376.653.612 |
| **-** Konstruksi dalam penyelesaian | 2.671.806.000 | 4.112.905.879 | - | 6.784.711.879 |
| **Jumlah Nilai Perolehan** | **74.697.186.770** | **26.158.474.974** | **-** | **100.855.661.744** |
| **Akumulasi Penyusutan**  **-** Peralatan dan mesin | 29.498.550.245 | 5.272.644.206 |  | 34.771.194.451 |
| **-** Gedung dan bangunan | 2.489.827.807 | 438.669.658 | - | 2.928.497.465 |
| **-** Jaringan dan instalasi | 470.112.457 | 108.126.536 |  | 578.238.993 |
| **Jumlah Akumulasi Penyusutan** | **32.458.490.509** | **5.819.440.400** | **-** | **38.277.930.909** |
| **Nilai Buku** |  |  |  |  |
| **-** Tanah | 3.801.318.523 |  | | 3.801.318.523 |
| **-** Peralatan dan mesin | 12.361.886.914 |  | | 20.866.527.316 |
| **-** Gedung dan bangunan | 21.192.932.238 |  | | 28.326.758.498 |
| **-** Jaringan dan instalasi | 2.210.752.586 |  | | 2.798.414.619 |
| **-** Konstruksi dalam penyelesaian | 2.671.806.000 |  | | 6.784.711.879 |
| **Jumlah Nilai Buku** | **42.238.696.261** |  | | **62.577.730.835** |
|  |  | **TAHUN 2020** | |  |
|  | **31 Desember 2019** | **Penambahan \*)** | **Pengurangan \*)** | **31 Desember 2020 \*)** |
| **Biaya Perolehan**  **-** Tanah | 3.801.318.523 | - | - | 3.801.318.523 |
| **-** Peralatan dan mesin | 37.876.976.145 | 3.983.461.014 | - | 41.860.437.159 |
| **-** Gedung dan bangunan | 23.712.760.045 | - | 30.000.000 | 23.682.760.045 |
| **-** Jaringan dan instalasi | 2.680.865.043 | - | - | 2.680.865.043 |
| **-** Konstruksi dalam penyelesaian | 2.671.806.000 | - | - | 2.671.806.000 |
| **Jumlah Nilai Perolehan** | **70.743.725.756** | **3.983.461.014** | **30.000.000** | **74.697.186.770** |
| **Akumulasi Penyusutan**  **-** Peralatan dan mesin | 25.949.269.879 | 8.636.779.169 | 5.087.498.803 | 29.498.550.245 |
| **-** Gedung dan bangunan | 2.117.104.037 | 474.255.200 | 101.531.430 | 2.489.827.807 |
| **-** Jaringan dan instalasi | 390.534.261 | 268.086.504 | 188.508.308 | 470.112.457 |
| **Jumlah Akumulasi Penyusutan** | **28.456.908.177** | **9.379.120.873** | **5.377.538.541** | **32.458.490.509** |
| **Nilai Buku** |  |  |  |  |
| **-** Tanah | 3.801.318.523 | 3.801.318.523 | | |
| **-** Peralatan dan mesin | 11.927.706.266 | 12.361.886.914 | | |
| **-** Gedung dan bangunan | 21.595.656.008 | 21.192.932.238 | | |
| **-** Jaringan dan instalasi | 2.290.330.782 | 2.210.752.586 | | |
| **-** Konstruksi dalam penyelesaian | 2.671.806.000 | 2.671.806.000 | | |
| **Jumlah Nilai Buku** | **42.286.817.579** | **42.238.696.261** | | |

Daftar Aset Tetap dapat dilihat pada: **Lampiran V**

Nilai penyusutan aset tetap tahun 2021 dan tahun 2020 telah disajikan berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemerintah Kabupaten Cilacap.

# ASET TETAP

Lanjutan

Alokasi beban penyusutan tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2020 \*)** |
| **-** Beban Penyusutan | 5.819.440.399 | 4.001.582.332 |
| Total | 5.819.440.399 | 4.001.582.332 |

# ASET TAK BERWUJUD

Merupakan nilai perolehan aset tak berwujud setelah dikurangi amortisasi per 31 Desember 2021 dan 2020, terdiri dari:

# TAHUN 2020

**31 Desember 2020 \*)**

# Penambahan

**Pengurangan**

# TAHUN 2021

**31 Desember 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biaya Perolehan**  **-** Perangkat Lunak Software | 131.562.500 |  |  | 131.562.500 |
| **Jumlah Nilai Perolehan** | **131.562.500** | **-** | **-** | **131.562.500** |
| **Akumulasi Amortisasi**  **-** Perangkat Lunak Software | 96.553.385 | 18.265.625 |  | 114.819.010 |
| **Jumlah Akumulasi Amortisasi** | **96.553.385** | **18.265.625** | **-** | **114.819.010** |
| **Nilai Buku**  **-** Perangkat Lunak Software | 35.009.115 |  | 18.265.625 | 16.743.490 |
| **Jumlah Nilai Buku** | **35.009.115** | **-** | **18.265.625** | **16.743.490** |

# ASET LAIN-LAIN

Merupakan barang rusak berat yang sudah tidak dapat menjadi aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari :

# 31 Desember 2021

**31 Desember 2020**

**-** Aset Lain-Lain

# Jumlah Aset Lain Lain

1. **UTANG USAHA**

Merupakan utang usaha kepada pihak ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari :

* + Utang Pihak Ketiga
  + Utang Uang Muka Covid

# Jumlah Utang Usaha

1. **PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA**

556.784.227

# 556.784.227

**31 Desember 2021**

-

-

# -

556.784.227

# 556.784.227

**31 Desember 2020**

4.000.000

221.831.600

# 225.831.600

Merupakan pendapatan diterima dimuka berupa sewa ruang ATM dan kantor per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **31 Desember 2021** | **31 Desember 2020** |
| **-** Pendapatan diterima dimuka |  | 11.722.886 | 32.239.282 |
| **Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka** |  | **11.722.886** | **32.239.282** |
| Rincian sebagai berikut: |  |  |  |
| Nama Penyewa | Jangka Waktu | Nilai Kontrak | Sewa Dibayar Dimuka |
| PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk | 27/07/2017 - 03/03/2022 | 36.686.000 | 1.222.886 |
| PT. Bank Pembangunan Daerah | 15/06/2017 - 07/01/2022 | 25.896.000 | - |
| PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 31/05/2019 - 30/09/2023 | 30.000.000 | 10.500.000 |
| Kantor Kas PT. Bank Pembangunan Daerah | 10/06/2019 - 31/12/2022 | 6.000.000 | - |
| **Jumlah** |  | **98.582.000** | **11.722.886** |

# UTANG BEBAN

Merupakan kewajiban jangka pendek yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020, yang terdiri dari :

# 31 Desember 2021 31 Desember 2020 \*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Utang Pegawai** |  | | |
| **-** Beban Uang Saku/ Makan Rujuk Pasien | 200.000 | 150.000 | |
| **-** Beban Uang Lembur PNS | 500.000 | 360.000 | |
| **-** Beban Uang Lembur Non PNS | 5.655.000 | 180.000 | |
| **-** Beban Pegawai | - | 69.889.725 | |
| **-** Premi Asuransi Kesehatan | 79.359.707 | - | |
| Sub Jumlah | 85.714.707 | 70.579.725 | |
| **Utang Beban Jasa** |  |  | |
| **-** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 13.332.000 |  | - |
| **-** Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 589.000 |  | - |
| **-** Beban Obat – obatan | - |  | 562.887.366 |
| **-** Beban Darah | 153.430.000 |  | 137.685.000 |
| **-** Penggandaan | - |  | 507.750 |
| **-** Beban Pemeriksaan Lab | 12.088.800 |  | 9.677.800 |
| **-** Jasa servise | - |  | 258.657.709 |
| **-** Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya | 278.000 |  | 1.152.500 |
| **-** Beban Bahan Bakar Minyak/Gas | 1.014.750 |  | 190.000 |
| **-** Beban Bahan Alat Habis Pakai | - |  | 1.111.467.607 |
| **-** Beban Telepon | 736.175 |  | 789.186 |
| **-** Beban Air | 33.307.750 |  | 29.083.750 |
| **-** Beban Listrik | 64.695.930 |  | 74.744.800 |
| **-** Beban Kawat/ Faksimili/ Internet | 987.160 |  | 558.660 |
| **-** Belanja Surat Kabar/Majalah | 225.000 |  | - |
| **-** Beban Jasa Pelayanan | 12.215.583.046 |  | 1.443.886.266 |
| **-** Beban Jasa Pengangkutan/ Pengelolaan Sampah | 44.677.017 |  | 102.812.638 |
| **-** Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 200.000 |  | 3.875.000 |
| **-** Beban Pemeliharaan Perawatan Alat Kantor dan RT | - |  | 5.314.500 |
| **-** Sewa Komputer dan Printer | 7.866.240 |  | - |
| **-** Belanja Sewa Alat Kedokteran Mata | 89.760.000 |  | - |
| Sub Jumlah | 12.638.770.868 |  | 3.743.290.532 |
| **Jumlah Utang Beban** | **12.724.485.575** |  | **3.813.870.257** |

1. **EKUITAS**

Merupakan ekuitas RSUD Majenang Kabupaten Cilacap per 31 Desember 2021 dan 2020, terdiri dari:

# 31 Desember 2021

**31 Desember 2020 \*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **-** Ekuitas Awal | 26.941.867.619 | 26.941.867.619 |
| **-** Ekuitas Donasi | 7.576.565.910 | 7.576.565.910 |
| **-** Ekuitas Lainnya | 10.600.286.702 | 953.577.617 |
| **-** Surplus (Defisit) Tahun Lalu | 12.563.370.328 | 18.086.788.007 |
| **-** Surplus (Defisit) Tahun Berjalan | 30.812.204.140 | 752.964.827 |
| **Jumlah Ekuitas** | **88.494.294.698** | **54.311.763.980** |

# PENDAPATAN - LO

Merupakan pendapatan tahun 2021 dan 2020 berdasarkan basis akrual, sebagai berikut:

# 2021 2020

* + Pendapatan Jasa Layanan
  + Pendapatan Hasil Kerjasama
  + Pendapatan APBD
  + Pendapatan Hibah
  + Pendapatan Usaha Lainnya

# Jumlah Pendapatan

Rincian pendapatan sebagai berikut:

93.916.224.446

251.419.896

30.496.110.939

131.030.516

139.884.254

# 124.934.670.051

54.245.425.506

75.299.596

15.226.341.761

2.132.755.139

691.346.850

# 72.371.168.852

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Jenis Pendapatan** | **2021** | **2020** |
| Pendapatan Jasa Layanan | Pasien Umum | 9.755.779.377 | 8.075.136.784 |
|  | Pasien BPJS | 36.670.618.036 | 35.978.037.443 |
|  | Pasien Kerjasama | 559.750.533 | 10.192.251.279 |
|  | Pasien Covid-19 | 46.930.076.500 | - |
|  |  | **93.916.224.446** | **54.245.425.506** |

1. **PENDAPATAN - LO**

Lanjutan

# Uraian Jenis Pendapatan 2021 2020

Pendapatan Hasil Kerjasama Pendidikan & Pelatihan

Sewa Lahan

230.903.500 54.783.200

20.516.396 20.516.396

# 251.419.896 75.299.596

Pendapatan APBD Subsidi Belanja Operasional Subsidi Belanja Modal

12.949.059.116

15.634.194.687

12.283.573.673

2.942.768.088

Subsidi Belanja Jasa

Pendapatan Hibah Hibah dari Badan / Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri

1.912.857.136 -

# 30.496.110.939 15.226.341.761

90.407.900 1.716.253.415

Hibah dari Kelompok Masyarakat

Pendapatan Usaha Lainnya Jasa Giro Bunga Deposito Lain-lain

40.622.616

# 131.030.516

64.082.901

48.443.197

27.358.156

# 139.884.254

416.501.724

# 2.132.755.139

-

-

691.346.850

# 691.346.850

# Jumlah Pendapatan 124.934.670.051 72.371.168.852

1. **BEBAN PEGAWAI**

Merupakan beban belanja pegawai pada APBD dan BLUD RSUD Majenang Kabupaten Cilacap tahun 2021 dan 2020 terdiri dari:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2021** | | **2020** |
| **-** Beban Gaji pokok PNS / uang representasi | 9.598.490.854 | 9.264.338.362 |
| **-** Beban Beban Tunjangan keluarga | 878.406.645 | 849.800.782 |
| **-** Beban Tunjangan jabatan | 101.860.000 | 92.120.000 |
| **-** Beban Tunjangan fungsional | 1.026.475.000 | 902.485.000 |
| **-** Beban Tunjangan umum | 114.190.000 | 180.525.000 |
| **-** Beban Tunjangan beras | 596.595.960 | 492.528.420 |
| **-** Beban Tunjangan PPh / Beban Tunjangan khusus | 41.478.668 | 37.433.720 |
| **-** Beban Pembulatan gaji | 157.326 | 136.900 |
| **-** Beban Iuran Kesehatan | 402.472.664 | - |
| **-** Beban Iuran Asuransi Tenaga Kerja | 78.842.274 | 76.335.092 |
| **-** Beban Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap | 289.550.000 | 315.640.000 |
| **-** Beban Honorarium THDSK | 3.383.664.169 | 2.588.490.000 |
| **-** Beban Premi Asuransi Kesehatan | 804.227.924 | 901.534.072 |
| **-** Beban Uang Saku/ Makan Petugas Rujuk | 19.450.000 | 16.325.000 |
| Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 23.000.000 | - |
| **-** Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 233.820.000 | 247.380.000 |
| **-** Beban Honorarium Pengelola Keuangan | 232.900.000 | 215.040.000 |
| **-** Beban Honorarium Petugas Pengelola Barang | 12.600.000 | 20.300.000 |
| **-** Beban Uang Lembur PNS | 10.770.000 | 5.355.000 |
| **-** Beban Uang Lembur NON PNS | 40.965.000 | 12.800.000 |
| **-** Beban Honorarium Dewan Pengawas | 145.500.000 | 108.000.000 |
| **-** Beban Honorarium Assesment Konseling | - | 39.200.000 |
| **-** Beban Honor Tim SPI | 1.350.000 | - |
| **-** Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN | 1.262.535.709 | - |
| **Jumlah Beban Pegawai** | **19.299.302.193** | **16.365.767.348** |

# BEBAN HIBAH

Merupakan beban hibah dari Pemerintah Daerah pada APBD dan BLUD RSUD Majenang Kabupaten Cilacap tahun 2021 dan 2020 terdiri dari:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2020** |
| **-** Beban Hibah | - | 522.473.404 |
| **Jumlah Beban Hibah** | **-** | **522.473.404** |

# BEBAN PERSEDIAAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merupakan beban barang dan jasa RSUD Majenang Kabupaten Cilacap tahun 2021 dan 2020 terdiri dari: | |  |
| **2021** | | **2020** |
| **-** Beban Alat Tulis Kantor | 458.637.729 | 196.923.061 |
| **-** Beban Obat obatan dan BHP | 22.300.859.756 | 19.908.732.141 |
| **-** Beban Persediaan Makanan Pokok | 982.970.495 | 415.146.345 |
| **-** Beban Alat Listrik dan Elektronik | 145.118.895 | 164.975.500 |
| **-** Beban Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 219.462.244 | 354.545.688 |
| **-** Beban Bahan Baku Bangunan | 169.976.500 | - |
| **-** Beban Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 11.131.000 | 6.889.500 |
| **-** Beban Pengisian Tabung Gas | 87.300.000 | - |
| **Jumlah Beban Persediaan** | **24.375.456.619** | **21.047.212.235** |

1. **BEBAN BARANG DAN JASA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merupakan beban barang dan jasa RSUD Majenang Kabupaten Cilacap tahun 2021 dan 2020 terdiri dari: | |  |
| **2021** | | **2020** |
| **-** Beban Bahan Perlengkapan Pemulasaraan Jenazah | 488.589.000 | 49.151.000 |
| **-** Beban Jasa Pelayanan | 33.274.577.978 | 16.155.261.885 |
| **-** Beban Jasa Kebersihan dan Keamanan | 980.298.000 | 827.314.800 |
| **-** Beban Jasa Pengujian Laboratorium | 153.821.400 | 210.880.967 |
| **-** Beban Bahan Bakar Minyak/Gas | - | 208.637.605 |
| **-** Beban Pemeriksaan Kesehatan Karyawan | - | 3.243.000 |
| **-** Beban Pakaian Kerja Lapangan | 68.664.600 | 81.553.140 |
| **-** Beban Pakaian Dinas Harian | 140.182.700 | - |
| **-** Beban Kursus - kursus Singkat/ Pelatihan | 71.315.000 | 28.400.000 |
| **-** Beban Penggandaan ( Foto Copy ) | 12.484.150 | - |
| **-** Beban Cetak | 480.559.450 | 55.650.850 |
| **-** Beban Surat Kabar/Majalah | - | 4.415.000 |
| **-** Beban Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga Rumah Sakit | 249.163.876 | 427.821.623 |
| **-** Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 424.825.043 | 311.627.102 |
| **-** Beban Makanan dan Minuman Rapat | 17.021.670 | 30.167.710 |
| **-** Beban Bimbingan Teknis | 96.096.775 | 48.300.000 |
| **-** Beban Jasa Pengembangan SIM RS | 265.089.940 | 179.770.000 |
| **-** Beban Makanan dan Minuman Tamu | 10.691.025 | 11.385.000 |
| **-** Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | - | 147.600.000 |
| **-** Beban Sertifikasi | 3.000.000 | 31.100.000 |
| **-** Beban Jasa Konsultasi Perencanaan | 706.083.500 | 39.250.000 |
| **-** Beban Jasa Konsultasi Pengawasan | 109.413.000 | - |
| **-** Beban Jasa Pembuatan Media Informasi / Publikasi | 34.770.000 | 29.151.040 |
| **-** Beban Jasa Pengangkutan/ Pengelolaan Sampah | 628.621.910 | 692.126.616 |
| **-** Iuran Irspi-Arsada | - | 25.635.000 |
| **-** Beban Retur Pelayanan Pasien | - | 5.992.172 |
| **-** Beban Pajak Barang Milik Daerah | 10.189.908 | 15.901.025 |
| **-** Beban Darah | 1.762.100.000 | 1.572.490.000 |
| **-** Beban Retur Obat dan BAHP | - | 1.936.973 |
| **-** Beban Sewa Komputer dan Printer | - | 23.836.050 |
| **-** Beban Jasa Service | - | 118.553.760 |
| **-** Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 54.050.000 | - |
| **-** Beban Jasa Transaksi Keuangan | 411.500 | - |
| **-** Beban Jasa KIR | 1.370.000 | - |
| **-** Beban Sewa Alat Kedokteran Mata | 355.300.000 | - |
| **-** Beban Sewa Alat Pendingin | 85.330.000 | - |
| **-** Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 17.763.533 | - |
| **-** Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 8.385.000 | - |
| **-** Beban Jasa Tenaga Kesehatan | 650.321.427 | - |
| **Jumlah Beban Barang dan Jasa** | **41.160.490.385** | **21.337.152.318** |

# BEBAN PEMELIHARAAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merupakan beban pemeliharaan RSUD Majenang Kabupaten Cilacap tahun 2021 dan 2020 terdiri dari: | |  |
| **2021** | | **2020** |
| **-** Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran | 820.387.938 | 545.171.670 |
| **-** Beban Perawatan Kendaraan Bermotor | 182.381.843 | - |
| **-** Beban Pemeliharaan Perawatan Alat Kantor dan Rumah Tangga | 259.872.315 | 166.732.763 |
| **-** Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 530.121.330 | 1.475.086.603 |
| **-** Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 18.480.000 | 79.753.100 |
| **-** Beban Pemeliharaan Kebersihan Taman, Makam, dan Penerangan Jalan | 54.750.000 | 51.419.000 |
| **Jumlah Beban Pemeliharaan** | **1.865.993.426** | **2.318.163.136** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MAJENANG** | | | |
| **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN** | | | |
| **UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021** | | | |
| (Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | | | |
| **33** | **BEBAN LANGGANAN DAYA DAN JASA** |  |  |
| Merupakan beban langganan daya dan jasa RSUD Majenang Kabupaten Cilacap tahun 2021 dan 2020 terdiri dari: | | | |
|  |  | **2021** | **2020** |
|  | Beban Kawat/Faximile/Internet | 126.814.457 | 132.411.477 |
|  | Beban Air | 478.571.300 | 377.495.750 |
|  | Beban Telepon | 18.106.862 | 12.225.378 |
|  | Beban Listrik | 741.985.828 | 723.746.860 |
|  | Beban Pengadaan | - | 14.824.650 |
|  | Beban Surat Kabar / Majalah | 4.665.000 | - |
|  | Beban Bahan Bakar Minyak / Gas | 327.497.964 | - |
|  | Beban Keanggotaan Rumah Sakit | 18.900.000 | - |
|  | Beban Sewa Komputer dan Printer | 48.654.700 | - |
|  | **Jumlah Beban Langganan Daya dan Jasa** | **1.765.196.111** | **1.260.704.115** |
| **34** | **BEBAN PERJALANAN DINAS** |  |  |
| Merupakan beban perjalanan dinas RSUD Majenang Kabupaten Cilacap tahun 2021 dan 2020 terdiri dari: | | | |
|  |  | **2021** | **2020** |
|  | Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 98.548.500 | 122.832.400 |
|  | Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah | 130.199.639 | 58.560.604 |
|  | **Jumlah Beban Perjalanan Dinas** | **228.748.139** | **181.393.004** |
| **35** | **BEBAN LAIN LAIN** |  |  |
| Merupakan beban lain lain RSUD Majenang Kabupaten Cilacap tahun 2021 dan 2020 terdiri dari: | | | |
|  |  | **2021** | **2020** |
|  | Beban Retur Pelayanan Pasien | 16.585.100 | - |
|  | **Jumlah Beban Perjalanan Dinas** | **16.585.100** | **-** |
| **36** | **BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI** |  |  |
| Merupakan beban penyusutan dan amortisasi RSUD Majenang Kabupaten Cilacap tahun 2021 dan 2020 terdiri dari: | | | |
|  |  | **2021** | **2020** |
|  | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 5.272.644.205 | 8.366.060.006 |
|  | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 438.669.658 | 474.255.200 |
|  | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 108.126.536 | 268.086.504 |
|  | Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud | 18.265.625 | 193.766.111 |
|  | **Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi** | **5.837.706.024** | **9.302.167.821** |
| Rincian beban penyusutan aset tetap dan beban amortisasi aset tak berwujud RSUD Majenang Kabupaten Cilacap dapat dilihat dalam **Lampiran V dan Lampiran VI.** | | | |
| **37** | **BEBAN PENYISIHAN PIUTANG** |  |  |
| Merupakan beban penyisihan piutang RSUD Majenang Kabupaten Cilacap tahun 2021 dan 2020 terdiri dari: | | | |
|  |  | **2021** | **2020** |
|  | Beban Penyisihan tahun berjalan | (427.012.086) | (750.229.897) |
|  | **Jumlah Beban Penyisihan Piutang** | (427.012.086) | (750.229.897) |
| **38** | **KEGIATAN NON OPERASIONAL** |  |  |
| Merupakan kegiatan non operasional RSUD Majenang Kabupaten Cilacap tahun 2021 dan 2020 terdiri dari: | | | |
|  |  | **2021** | **2020** |
|  | Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya | - | 131.365.617 |
|  | **Jumlah Kegiatan Non Operasional** | **-** | **131.365.617** |
| **39** | **PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN** |  |  |
|  | Manajemen RSUD Majenang Kabupaten Cilacap bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang diselesaikan pada tanggal 21 Maret  2022. | | |

**-**

# -

**-**

# -

**-**

# -

**-**

# -

**-**

# -

**-**

# -

**-**

# -

**-**

# -

**-**

# -